

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 - 2025 (Studi pada Wisata Lumpur Panas Lapindo Sidoarjo)

Ade Rizky Setiarso

*Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya
Surel: claalix@gmail.com*

Abstrak

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2025 merupakan kebijakan publik yang di dalamnya membahas tentang pembangunan pada suatu tempat pariwisata salah satunya yaitu wisata lumpur lapindo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2025 pada wisata lumpur lapindo dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, yang berupaya memberikan gambaran dan keadaan sebenarnya pada pengembangan wisata lumpur lapindo. Data dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dan juga masyarakat sekitar wisata lumpur lapindo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dari pemerintah untuk mengembangkan wisata lumpur lapindo untuk menjadi tempat wisata yang menarik belum tercapai, itu semua dikarenakan dari ketiga indikator yang digunakan penulis hanya satu indikator yang implementasi kebijakannya tercapai sedangkan dua indikator lainnya tidak tercapai karena dari kedua indikator tersebut implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan wisata lumpur lapindo menjadi tempat wisata yang menarik belum tercapai dengan baik.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, wisata, lumpur lapindo

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi yang cepat banyak selaki faktor – faktor yang mempengaruhi, salah satunya yaitu pariwisata. Di Negara Indonesia yang terdiri banyak sekali pulau – pulau dan memiliki kekayaan alam yang melimpah, serta memiliki keaneragaman keindahan alam yang menakjubkan menjadikan Negara Indonesia ini memiliki banyak sekali tempat wisata. Yang dimana pariwisata itu adalah salah satu industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Menurut E. Guyer Freuler merumuskan pengertian pariwisata dengan memberikan batasan sebagai Pariwisata dalam arti modern adalah fenomena dari jaman sekarang

yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas manusia sebagai hasil dari perkembangan perniagaan, industri, serta penyempurnaan dari alat-alat pengangkutan (sinaga, supriyono, 2019).

Undang-undang nomor 10 tahun 2009 dalam ketentuan umum menyatakan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha (PJKH, 2009). Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 - 2025. Dari peraturan tersebut yang intinya membahas tentang keadaan alam, flora, dan fauna, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (sidoarjokab, 2014).

Dari Kebijakan Pemerintah di atas tersebut dibuat untuk mendukung pengembangan pariwisata baik di Indonesia walaupun di daerah Sidoarjo itu sendiri. Tempat Pariwisata yang ada di Sidoarjo ini juga memiliki pariwisata yang beragam, ada juga tempat wisata yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini yang unik. Karena tempat wisata ini tercipta dikarenakan bencana alam yang menimpa Kabupaten Sidoarjo di daerah Porong. Akan tetapi di belakang itu bencana alam juga dapat berdampak positif bagi manusia. Seperti contohnya bencana alam Lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo itu merupakan bencana alam terbesar sedunia, dan saat ini bencana alam lumpur lapindo tersebut sudah diubah oleh penduduk sekitar menjadi tempat wisata Kabupaten Sidoarjo. Wisata Lumpur Lapindo ini sendiri dapat menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Karena dengan berkembangnya pariwisata suatu daerah dapat mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomi.

Dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Kepariwisata Daerah Pemerintahan Kota Sidoarjo yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana implementasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya pengembangan Wisata Lumpur Panas Lapindo ini supaya wisata yang dulunya merupakan bencana lumpur lapindo ini bisa diubah menjadi tempat wisata pada umumnya. Dikarenakan sampai saat ini tempat Wisata Lumpur Panas Lapindo tersebut masih belum terdapat pengembangan yang begitu signifikan yang dimana seharusnya akan dibangunnya taman belajar di tempat Wisata Lumpur Panas Sidoarjo, tetapi sampai saat ini masih belum terdapat taman tersebut dan begitu pula pembangunan yang lain – lain. Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo khususnya Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo seharusnya memperhatikan hal tersebut.

Yang dimana itu merupakan kewajiban bagi Pemerintah sekitar dan juga warga sekitar supaya dapat memanfaatkan keadaan alam sekitar supaya bisa memberikan kesejahteraan.

Bedasarkan pendahuluan yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2025 dan tentang faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan dalam mengembangkan wisata lumpur lapindo.

Metode Penelitian

Sumber data adalah sesuatu yang menjadi sumber untuk memperoleh sebuah data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data berupa hasil wawancara dari para informan dan juga bisa data dari internet tentang pelaksanaan pengembangan wisata lumpur lapindo Sidoarjo. Dalam Penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis data kualitatif yang berkaitan dengan masing-masing fokus penelitian yang sedang diamati.

Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar dan rekaman, dokumen atau arsip. Sedangkan menurut Lofland dalam Lexy J. Moleong, (1990: 47), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen (2019).

Hasil dan Pembahasan

Keramahan masyarakat setempat pada pengunjung pariwisata adalah faktor pertama yang mempengaruhi para pengunjung wisatawan supaya mendapatkan pengalaman yang bagus saat berkunjung ke tempat wisata tersebut, selain keramahan murah senyuman dan perhatian juga bisa mempengaruhi kenyamanan para pengunjung wisatawan. Hal ini disebabkan karena keramahan, murah senyuman dan perhatian bisa membuat minat para wisatawan cenderung memperhatikan tempat wisata tersebut. Sebaliknya, jika para masyarakat tidak memiliki keramahan, murah senyuman dan perhatian minat para pengunjung wisatawan bisa menjadi berkurang untuk berkunjung ke wisata lumpur lapindo lagi, tau bahkan lebih buruknya mereka menyebarkan hal yang tidak baik terhadap wisata lumpur lapindo ini kepada orang lain yang ingin berkunjung atau belum pernah berkunjung ke wisata lumpur lapindo tersebut.

Untuk memberi arahan para stakeholder yang ikut serta dalam upaya pengembangan wisata lumpur lapindo ini, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo memberikan pembekalan kepada mereka yaitu upaya DISPORAPAR Kabupaten Sidoarjo dalam memberi pembekalan kepada stakeholder yang ikut serta dalam pengembangan wisata lumpur lapindo Sidoarjo.

Dari hasil wawancara dan observasi diperoleh gambaran bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2025 khususnya pada wisata lumpur lapindo adalah masih dalam tahap perencanaan.

Pembahasan penulis dengan indikator Kebijakan Pemerintah seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kemakmuran masyarakat sekitar kawasan wisata lumpur lapindo sebelum merencanakan pembangunan guna mengembangkan wisata lumpur lapindo, karena menurut masyarakat sekitar masalah lumpur lapindo belum selesai sehingga hasilnya pemerintah mendapatkan partisipasi masyarakat sekitar untuk membantu keberhasilan rencana pemerintah dalam pembangunan wisata lumpur lapindo. Jadi analisis implementasi tidak tercapai karena pemerintah harus lebih dahulu memperhatikan kemakmuran masyarakat sekitar terlebih dahulu supaya masyarakat sekitar wisata lumpur lapindo mendukung kebijakan dari pemerintah.

Dalam indikator teori Vam Meter dan Van Horn pada variabel standart dan sasaran kebijakan memang seharusnya standart sasaran kebijakan tidak melenceng dari yang semestinya untuk wisata lumpur lapindo. Dan menurut hasil wawancara dengan masyarakat sekitar standart dan sasaran kebijakan dari pemerintah juga tidak melenceng tetapi untuk tercapainya dari kebijakan masih belum sehingga jika seharusnya standart dan sasaran kebijakan pemerintah bisa tercapai maka bisa dengan mudah melaksanakan perencanaan pembangunan untuk wisata lumpur lapindo ini sehingga hasilnya wisata lumpur lapindo bisa menjadi tempat wisata yang menarik. Jadi implementasi kebijakan jika di ukur melalui variabel standard dan sasaran kebijakan bisa dikatakan tidak tercapai karena hanya standart dan sasaran kebijakan saja yang sesuai tetapi tidak standart dan sasaran kebijakannya tidak tercapai untuk mengembangkan wisata lumpur lapindo menjadi tempat wisata yang menarik.

Selanjutnya yaitu variabel sumber daya seharusnya pelaksana kebijakan dalam memberikan sumber daya untuk mengembangkan wisata lumpur lapindo bisa secara transparan sehingga masyarakat mengetahui pemasukan dan pengeluaran yang diberikan oleh pemerintah dan hasilnya pemerintah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar bahwasannya pemerintah benar – benar berniat dalam melaksanakan rencana untuk mengembangkan wisata lumpur lapindo. Karena sampai saat ini masyarakat masih belum tahu pasti kapannya pemerintah mulai melakukan pembangunan untuk mengembangkan wisata lumpur lapindo. Jadi implementasi kebijakan jika di ukur melalui variabel sumber daya juga belum tercapai karena sumber daya yang diberikan pemerintah masih secara perlahan – lahan dan tidak transparan.

Yang terakhir yaitu variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik seharusnya jika kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik di kawasan wisata lumpur lapindo mendukung maka akan sangat mendukung keberhasilan dari implementasi kebijakan untuk wisata lumpur lapindo. Dan pemerintah pun bisa mendapatkan respon yang baik dari masyarakat sekitar selain itu masyarakat juga akan terpengaruh untuk melaksanakan kebijakan dari pemerintah dalam pelaksanaannya mengembangkan wisata lumpur lapindo. Jadi implementasi kebijakan jika diukur dari variabel

lingkungan sosial, ekonomi dan politik tidak tercapai karena pemerintah harus bisa terlebih dahulu memakmurkan masyarakat sekitar wisata terlebih dahulu dengan itu kondisi sosial, ekonomi dan politik disana bisa mendukung untuk keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Indikator yang terakhir adalah indikator pengembangan wisata, dalam indikator ini seharusnya seperti contohnya wisata gunung merapi yang merupakan wisata dari bencana alam letusan gunung merapi yang dimanfaatkan menjadi tempat wisata. Di wisata gunung merapi tersebut pengembangan wisatanya dalam aspek fisik, aktivitas dan fasilitas terlaksana dengan baik karena masyarakat disana sadar jika kebijakan dari pemerintah akan membawa keuntungan jika dilaksanakan. Lain halnya dengan wisata lumpur lapindo dari pengembangan wisata dalam aspek fisik belum terlaksana, dan aspek aktivitas dan fasilitas baru ojek dan warung kopi, pengembangan wisata lumpur lapindo ini belum terlaksana dikarenakan pembangunan untuk mengembangkan wisata lumpur lapindo ini masih dalam tahap rencana. Jika pemerintah dan warga sekitar langsung melakukan pembangunan untuk wisata lumpur lapindo tanpa adanya rencana jangka panjang maka akan terjadi masalah. Masalahnya yaitu tanggul lumpur jika tidak diperhatikan bisa jebol kapan saja. Maka dari itu baik dari pemerintah dan masyarakat sekitar setuju jika tanggul lumpur harus diutamakan terlebih dahulu dibandingkan pembangunan wisata lumpur lapindo. Selain itu pemerintah juga sudah menjanjikan bahwasannya pembangunan akan terlaksana jika tanggul sudah di pastikan tidak mudah jebol. Jadi implementasi kebijakan jika diukur melalui indikator pengembangan wisata ini bisa dikatakan tercapai, karena baik dari pemerintah yang sudah merencanakan pembangunan untuk mengembangkan wisata lumpur lapindo dan juga dari masyarakat yang sadar bahwa pemerintah harus terlebih dahulu memikirkan tanggul terlebih dahulu lalu baru focus pada pembangunan wisata lumpur lapindo.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari ketiga indikator hanya satu indikator yang implementasi kebijakannya tercapai sedangkan dua indikator lainnya tidak tercapai karena dari kedua indikator tersebut implementasi kebijakan pemerintah tidak tercapai dengan baik. Sedangkan dari faktor pendukung dan penghambat melalui wawancara di DinasKepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat sekitar wisata lumpur lapindo, dan juga observasi pada wisata lumpur lapindo bahwa dari hasil penelitian indikator yang dominan dalam faktor pendukung dan penghambat menurut penulis adalah indikator dari teori Van Meter dan Van Horn pada variabel standart dan sasaran kebijakan dan variable lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Indikator yang mendukung faktor pendukung untuk implementasi kebijakan pemerintah dalam mengembangkan wisata lumpur lapindo yaitu pada variable standart dan sasaran kebijakan. Dari hasil penelitian disitu menunjukkan bahwa standart dan sasaran kebijakan sudah sesuai pada implementasi pengembangan wisata lumpur lapindo, karena standart dan sasaran kebijakan tidak melenceng dari yang semestinya untuk mengembangkan wisata lumpur lapindo. seperti yang dikatakan pada teori Van Meter dan Van Horn pada variabel standart dan sasaran kebijakan yang mengatakan bahwa:

“Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut”

Seperti yang disebutkan oleh Bapak Trisnanto (54 tahun) selaku Sekretariat Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabutpaten Sidoarjo yang mengatakan bahwa:

“Kami selaku Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo sudah memberikan pembekalan kepada para stakeholder dan juga masyarakat setempat supaya wisata lumpur lapindo ini bisa berkembang mereka harus ramah kepada para pengunjung dan juga kami memberi tahu mereka bahwasannya senyum itu hal yang penting supaya para pengunjung bisa merasa nyaman dan tidak risih kepada para masyarakat disana. Sampai saat ini hal tersebut sudah dipraktekan oleh masyarakat tersebut dan hasilnya wisata lumpur lapindo mendapatkan kemajuan dari jumlah pengunjung setiap tahunnya”

Jadi pada variabel standart dan sasaran kebijakan pemerintah menjadi faktor pendukung dalam mengembangkan wisata lumpur lapindo ini supaya bisa menjadi wisata yang menarik

Sedangkan untuk indikator yang hasilnya paling dominan untuk faktor penghambat implementasi kebijakan adalah dari variable lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Karena dari hasil penelitian variable lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang ada di kawasan lumpur lapindo tidak mendukung keberhasilan implementasi kebijakan untuk mengembangkan wisata lumpur lapindo. Baik kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik disana tidak memungkinkan dalam mendukung keberhasilan implementasi kegijakan supaya lumpur lapindo bisa menjadi tempat wisata yang manrik. Sama seperti yang dikatakan pada teori Van Meter dan Van Horn pada variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik bahwa “lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan”. Begitu pula dengan kata masyarakat sekitar yang salah satunya bernama Bapak Solikhan (54 tahun) yang mengatakan bahwa:

“Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik disini tidak membantu untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan untuk mengembangkan wisata lumpur lapindo.karena kehidupan masyarakat di sini belum dimakmurkan terlebih dahulu”

Jadi pada variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik menjadi faktor penghambat dalam mengembangkan wisata lumpur lapindo supaya menjadi tempat wisata yang menarik karena menurut dari salah satu masyarakat disana bahwa kehidupan masyarakat disana belum makmur.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian indikator yang dominan dalam faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan untuk wisata lumpur lapindo ini adalah indikator teori Van Meter dan Van horn pada varibael standart dan sasaran kebijakan yang merupakan faktor pendukung di karenakan standart dan sasaran kebijakan sudah sesuai dan untuk implementasi kebijakan dan variable lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang

merupakan faktor penghambat di karenakan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik disana tidak mendukung implementasi kebijakan untuk wisata lumpur lapindo supaya bisa menjadi tempat wisata yang menarik bagi para wisatawan.

Simpulan

Bedasarkan hasil penelitian diatas dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2025 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dari pemerintah untuk mengembangkan wisata lumpur lapindo untuk menjadi tempat wisata yang menarik belum tercapai, itu semua dikarenakan dari ketiga indikator yang digunakan penulis hanya satu indikator yang implementasi kebijakannya tercapai sedangkan dua indikator lainnya tidak tercapai karena dari kedua indikator tersebut implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan wisata lumpur lapindo menjadi tempat wisata yang menarik belum tercapai dengan baik. Dari semua indikator yang salah satunya indikator dari teori Van Meter Van Horn pada variabel standart dan sasaran kebijakan, sumber daya, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik tidak memenuhi syarat sebagai tercapainya implementasi kebijakan jika diukur melalui ketiga variabel tersebut.

Dan untuk mengetahui dari faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah daalam mengembangkan wisata Lumpur Panas Lapindo dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian indikator yang dominan yaitu indikator dari teori Van Meter dan Van horn pada variable standart dan sasaran kebijakan yang merupakan faktor pendukung dan pada variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan wisata lumpur lapindo.

Daftar Pustaka

- Donipengalaman9. (2019, 10 20). *Sumber data*. Retrieved from <https://donipengalaman9.wordpress.com>:
<https://donipengalaman9.wordpress.com/2012/04/01/240/>
- Ibrahim, A. (2019, 10 14). *Pengertian Kebijakan dan Macam-macam Kebijakan*. Retrieved from <https://pengertiandefinisi.com>: <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-kebijakan-dan-macam-macam-kebijakan/>
- pariwisataindonesia. (2019, 10 14). *Konsep Pengembangan Pariwisata*. Retrieved from [pariwisataindonesia2015: http://pariwisataindonesia2015.blogspot.com/2015/11/konsep-pengembangan-pariwisata.html](http://pariwisataindonesia2015.blogspot.com/2015/11/konsep-pengembangan-pariwisata.html)
- PJLHK. (2009, January 16). *UU 10 2019*. Retrieved from [ekowisata: https://www.ekowisata.org](http://www.ekowisata.org)
- Prima. (2019, 10 14). <https://primalifejournal.wordpress.com>. Retrieved from Implementasi Kebijakan Publik: <https://primalifejournal.wordpress.com/2013/02/25/implementasi-kebijakan-publik-2/>

sidoarjojab. (2014). *Peraturan Daerah Pemkab Sidoarjo*. Retrieved from sjdih:
<http://sjdih.sidoarjojab.go.id>
sinaga, supriyono. (2019, September 22). *Teori Pariwisata*. Retrieved from Plansurgent:
<https://plansurgent.wordpress.com>